

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kecamatan Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan Bangko terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Wilayah ini memiliki peran signifikan dalam administrasi daerah Kabupaten Rokan Hilir, dengan pusat administrasi terletak di Bagansiapiapi, yang juga berfungsi sebagai ibu kota dari seluruh kabupaten ini. Sejarah Kecamatan Bangko mencakup bagian penting dalam pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Bangko secara resmi bergabung dalam upaya pembentukan kabupaten baru ini, bersama dengan Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Rimba Melintang, dan Bagan Sinembah. Langkah ini diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Dalam konteks ini, Ujung Tanjung diangkat sebagai ibu kota awal, sementara Bagansiapiapi dijadikan ibu kota sementara.

Namun, dengan perkembangan infrastruktur kota yang pesat, Bagansiapiapi segera menonjol sebagai pusat administrasi yang kuat. Bukti nyata terlihat ketika Bagansiapiapi secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 Juni 2008, setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pembentukan kabupaten dan perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999. Persetujuan ini kemudian diresmikan sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna. Bagansiapiapi, yang lebih dikenal

dengan julukan Baganapi atau Bagan, berlokasi di muara Sungai Rokan di pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir. Sejarah kota ini mencatat peran strategisnya sebagai pelabuhan penting dalam perdagangan internasional, berkat kedekatannya dengan Selat Malaka. Pada masa tersebut, Bagansiapiapi menjadi salah satu pusat perdagangan internasional yang ramai. Bagansiapiapi juga pernah berfungsi sebagai ibu kota Kecamatan Bangko dalam konteks sejarah administrasi.

Secara lebih luas, Kabupaten Rokan Hilir mencakup tiga wilayah kenegerian, yaitu Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Masing-masing wilayah ini dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang melapor langsung kepada Sultan Siak, sesuai dengan sistem administrasi yang diterapkan pada masa Hindia Belanda. Asal usul administratif Kabupaten Rokan Hilir mencakup berdirinya Distrik Tanah Putih pada tahun 1890, yang merupakan distrik pertama di wilayah ini dan berperan penting dalam sejarah administratif daerah tersebut.

Bagansiapiapi, yang sering dikenal sebagai "Pecinan," merupakan gambaran hidup dan budaya kuat komunitas Tionghoa di wilayah ini. Di kota ini, dapat menjumpai sejumlah klenteng yang didirikan oleh komunitas Tionghoa, seperti Klenteng Eng Hok Kiong, Tjin Hai Kiong, Tianwusandoumugong (Klenteng Tian Wu San Dou Mu), Doumugonglongshansi (Klenteng Dou Mu Gong Long Shan), Xuantangong (Klenteng Xuan Tan), Jinlongdian (Klenteng Naga Mas), Qinshangong (Klenteng Gunung Biru), Wudangshan (Klenteng Gunung Wu Dang), dan Engaodang (Klenteng En Gao Dang). Klenteng-k lenteng ini adalah bukti kehadiran yang kental dari budaya dan tradisi Tionghoa dalam komunitas Bagan Siapi-api. Menurut legenda yang diturunkan secara turun-temurun di

masyarakat Bagan Siapi-api, sejarah penamaan Bagan Siapi-api memiliki akar dalam kedatangan komunitas Tionghoa pertama ke wilayah ini. Kisah ini menceritakan bahwa orang Tionghoa pertama yang mendarat di Bagan Siapi-api berasal dari Songkhla, Thailand. Mereka adalah para perantau Tionghoa yang berasal dari Distrik Tong'an (Tang Ua) di Xiamen, wilayah Provinsi Fujian, Tiongkok Selatan. Mereka tiba di Bagan Siapi-api setelah mengalami konflik dengan penduduk Songkhla, Thailand.

Rokan Hilir, yang terbentuk dari tiga kenegerian, yaitu Kubu, Bangko, dan Tanah Putih, diperintah oleh seorang Kepala Negeri yang memiliki kewajiban langsung kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama yang didirikan oleh Belanda di Tanah Putih pada tahun 1890 mengawali perkembangan administrasi di wilayah ini. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Bagan Siapi-api, Belanda memutuskan untuk memindahkan Pemerintahan Kontrolleur ke Kota Bagan Siapi-api pada tahun 1901. Keberhasilan pembangunan pelabuhan modern yang menjadi salah satu pelabuhan terlengkap di Selat Malaka semakin memajukan kota ini. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir kemudian digabungkan pada Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau.

Wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau, Indonesia, merupakan bagian dari Kewedanaan Bagansiapiapi. Wilayah ini terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, Bangko, Rimba Melintang, dan Bagan Sinembah. Perubahan signifikan terjadi pada tanggal 4 Oktober 1999 ketika Pemerintah Republik Indonesia menetapkan wilayah ini sebagai kabupaten baru, sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Sejak saat itu, Bagansiapiapi,

sebuah kota bersejarah yang pernah terkenal sebagai produsen ikan terbesar di Indonesia, ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki sejarah yang kaya. Sebelumnya, wilayah ini terdiri dari tiga negeri: Kubu, Bangko, dan Tanah Putih, yang dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang berada di bawah kekuasaan Sultan Kerajaan Siak. Pada tahun 1980, Belanda mendirikan distrik pertama mereka di Tanah Putih ketika menduduki daerah ini. Seiring dengan perkembangan pesat Kota Bagansiapiapi, Pemerintahan Kontrolleur Belanda dipindahkan ke sana pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin maju setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan komprehensif guna bersaing dengan pelabuhan lain di Selat Malaka, hingga Perang Dunia Pertama berakhir. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Namun, pada tanggal 4 Oktober 1999, wilayah ini dinyatakan sebagai kabupaten otonom yang baru dengan ibu kota awalnya berada di Ujung Tanjung dan ibu kota sementara di Bagansiapiapi. Dengan langkah ini, Kabupaten Rokan Hilir berkembang menjadi entitas pemerintahan yang lebih independen dan semakin berkembang dalam konteks Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hilir, sebuah entitas pemerintahan yang berpusat di tengah kota, yaitu di Jalan Merdeka No. 58, membentang di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera. Dengan luas wilayah mencapai 8.881,59 kilometer persegi, kabupaten ini bukan hanya mencakup daratan, tetapi juga pulau-pulau kecil serta perairan sernya yang menambah pesonanya. Secara geografis, Rokan Hilir memanjang sepanjang wilayah pantai, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah

Utara yang membentang luas, menghubungkan kabupaten ini dengan perairan internasional. Di sebelah Selatan, Kabupaten Rokan Hilir bertetangga dengan Kabupaten Kampar dan Bengkalis. Sementara itu, di sebelah Barat, wilayah ini berdampingan dengan Provinsi Sumatera Utara, mengukir garis batas yang beragam dalam kekayaan geografisnya. Keindahan alamnya tidak berhenti di situ saja. Di sebelah Timur, Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan Kota Dumai, membentuk sebuah pertemuan antara daratan dan laut yang mempesona.

Namun, yang lebih memukau adalah jaringan sungai yang menjalin wilayah ini. Kabupaten ini dapat dipuji sebagai rumah bagi sejumlah sungai yang menyejukkan hati dan memberikan sumber kehidupan. Dalam bukti nyata dari kelimpahan alam, terdapat tidak kurang dari 16 sungai yang mengalir dengan gemulai di Kabupaten Rokan Hilir ini. Tidak hanya menjadi sumber kekayaan alam, sungai-sungai ini juga menjadi jalur vital dalam sistem transportasi lokal. Perahu, perahu motor (pompong), dan kapal motor meluncur di atas air yang tenang ini, membuka pintu menuju hulu sungai Rokan yang legendaris.

Tentu saja, salah satu di antara semua sungai ini menonjol sebagai tulang punggung transportasi di wilayah ini. Sungai Rokan, dengan panjangnya yang mencapai ser 350 kilometer, merupakan tulang punggung utama dalam menghubungkan berbagai komunitas di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan aliran air yang luas dan sirkulasi yang lancar, Sungai Rokan menjadi sebuah jalur vital yang menghubungkan berbagai sudut kabupaten, memungkinkan transportasi yang efisien dan interaksi yang lebih baik antarwarga. Dengan aset alam yang berlimpah dan sarana transportasi sungai yang kuat, Kabupaten Rokan Hilir memancarkan

potensi yang tak ternilai dan keunikan dalam lanskap Provinsi Riau.

2.2 Kondisi Sosial Kecamatan Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai nilai luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 hektar, terdapat pada koordinat 1°14' sampai 2°45' Lintang Utara dan 100°17'hingga 101°21' Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Rokan Hilir pada tabel berikut:



Gambar 2.1 Peta Wilayah Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 2. 1 Batas Wilayah kecamatan Bangko Pusako Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Barat	Propinsi Sumatra Utara
Timur	Kota Dumai

Sumber : Arsip Kabupaten Rokan Hilir, 2023

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten yang ditempatkan secara geografis di sepanjang garis Khatulistiwa, mengalami iklim tropis yang khas dengan karakteristik curah hujan yang melimpah. Mengacu pada data dari tahun 2008, wilayah ini mencatat curah hujan tahunan mencapai 215,3 milimeter, dan suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celsius. Data ini mengungkapkan bahwa musim kemarau di Kabupaten Rokan Hilir lebih dominan dibandingkan musim hujan, dengan musim kemarau yang memiliki durasi rata-rata ser tujuh bulan dalam setahun, sementara musim hujan hanya berlangsung selama lima bulan. Kabupaten ini memancarkan kekayaan geografis yang unik, dengan perbedaan signifikan antara dataran rendah dan dataran tinggi. Bagian utara dari wilayah ini, yang merupakan ciri khas, adalah dataran rendah yang dikenali dengan adanya rawa-rawa yang membentuk delta sungai yang terbentuk seiring dengan aliran sungai. Sebaliknya, di sebelah selatan terdapat dataran tinggi yang melengkapi keragaman geografi wilayah ini.

Selain itu, Kabupaten Rokan Hilir juga dianugerahi dengan garis pantai yang mempesona dan pulau-pulau yang tersebar di berbagai kecamatan. Di antara pulau-pulau ini, beberapa di antaranya adalah Pulau Halang di Kecamatan Kubu, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi, yang semuanya menambah pesona alam wilayah ini. Pada tingkat yang lebih mikro, Kabupaten Rokan Hilir juga merupakan rumah bagi berbagai sungai yang mengalir di seluruh wilayah ini. Di antara sungai-sungai yang berlimpah, yang paling terkenal dan mungkin paling signifikan adalah Sungai Rokan. Dengan panjang mencapai ser 350 kilometer,

sungai ini menjadi salah satu elemen utama yang membentuk lanskap dan kehidupan masyarakat setempat. Selama bertahun-tahun, Sungai Rokan bukan hanya menjadi jalan transportasi penting yang menghubungkan komunitas, tetapi juga menjadi penyedia sumber daya untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan sebagai basis mata pencaharian melalui penangkapan ikan.

Namun, meskipun sungai ini memiliki peran bersejarah yang sangat penting, sungai Rokan menghadapi masalah pendangkalan serius di muaranya. Hal ini disebabkan oleh erosi yang terjadi di daerah hulu sungai, yang telah membentuk sebuah delta yang menyusutkan lebar sungai. Oleh karena itu, Sungai Rokan menjadi sangat sempit dan dangkal. Sungai Rokan memiliki peran penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat Melayu, yang menganggapnya sebagai lebih dari sekadar sumber air. Sungai ini juga menjadi tempat yang memfasilitasi pengembangan teknologi lokal, seperti pembuatan alat transportasi tradisional dan teknik menangkap ikan. Lebih dari itu, sungai ini telah menjadi landasan bagi berbagai inovasi dan kreativitas anak-anak yang tumbuh di tepi sungai ini. Kabupaten Rokan Hilir, melalui sungai Rokan, tidak hanya memancarkan keindahan alamnya, tetapi juga warisan budaya dan kehidupan masyarakat yang kaya. Dengan semua karakteristik alam dan budaya ini, wilayah ini adalah sebuah bagian yang sangat berharga dalam wilayah Provinsi Riau.

Pendidikan menduduki posisi yang sangat signifikan dalam ranah sosial, terutama di tengah era globalisasi yang semakin meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini telah mengubah pandangan tentang pendidikan dari sekadar

kebutuhan menjadi suatu hak dasar yang tak terbantahkan. Pendidikan membuka pintu kepada individu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan wawasan mereka, serta memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam masyarakat dan perekonomian global yang semakin terintegrasi. Selain dampak positifnya pada individu, pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat nasional. Tingkat pendidikan yang tinggi dalam suatu negara merupakan salah satu pendorong utama bagi kemajuan dan perkembangan. Sebuah negara dengan sumber daya manusia yang terdidik cenderung lebih mampu bersaing di panggung internasional dan berperan aktif dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mari eksplorasi lebih dalam dengan melihat data terkait tingkat pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako, yang terletak di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir. Data ini adalah cerminan dari sejauh mana pendidikan telah diadopsi dan berdampak pada komunitas setempat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi pendidikan di wilayah ini, dapat memahami bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk masa depan dan potensi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir secara lebih baik. Pendidikan menduduki posisi yang sangat signifikan dalam ranah sosial, terutama di tengah era globalisasi yang semakin meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan.

Hal ini telah mengubah pandangan tentang pendidikan dari sekadar kebutuhan menjadi suatu hak dasar yang tak terbantahkan. Pendidikan membuka pintu kepada individu untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan wawasan mereka, serta memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi aktif

dalam masyarakat dan perekonomian global yang semakin terintegrasi.

Selain dampak positifnya pada individu, pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan pada tingkat nasional. Tingkat pendidikan yang tinggi dalam suatu negara merupakan salah satu pendorong utama bagi kemajuan dan perkembangan. Sebuah negara dengan sumber daya manusia yang terdidik cenderung lebih mampu bersaing di panggung internasional dan berperan aktif dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mari eksplorasi lebih dalam dengan melihat data terkait tingkat pendidikan di Kecamatan Bangko Pusako, yang terletak di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir. Data ini adalah cerminan dari sejauh mana pendidikan telah diadopsi dan berdampak pada komunitas setempat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi pendidikan di wilayah ini, dapat memahami bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk masa depan dan potensi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir secara lebih baik. Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa Besito, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Data Tingkat Pendidikan Kecamatan Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	150 orang
2.	Sekolah Dasar/ sederajat	1.480 orang
3.	SMP	1.056 orang
4.	SMA/SMU	1.440 orang
5.	Akademi/D1-D3	66 orang
6.	Sarjana	392 orang
7.	S2	11 orang
8.	S3	1 orang
9.	Pondok Pesantren	9 orang
10.	Pendidikan Keagamaan	7 orang
11.	Sekolah Luar Biasa	9 orang
12.	Kursus Keterampilan	12 orang
13.	Tidak lulus	420 orang
14.	Tidak bersekolah	312 orang

Sumber : Arsip Kabupaten Rokan Hilir, 2023

Di tengah keberagaman yang menjadi salah satu ciri utama Bangsa Indonesia, saat ini tanpa ragu dapat menyaksikan perubahan besar dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh dinamika globalisasi. Pengaruh ini telah merambah moral dan perilaku masyarakat modern, menggiringnya menjauh dari akar kebudayaan lokal yang kaya dan beraneka ragam. Dalam arus globalisasi yang memanggil, budaya lokal seringkali mendapati dirinya tenggelam oleh gelombang budaya dunia yang lebih dominan. Sorotan pada nilai-nilai dan tradisi lokal perlu diperhatikan dan dilestarikan dengan sungguh-sungguh, terutama mengingat tantangan globalisasi yang terus menggulung tanpa henti. Sayangnya, saat ini menyaksikan fakta bahwa generasi muda sering kali

menunjukkan tingkat kepedulian yang rendah terhadap budaya lokal mereka. Hal ini berpotensi untuk berdampak pada perilaku dan kebiasaan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Penting untuk diingat bahwa keragaman budaya adalah aset berharga yang menjadi identitas utama Indonesia. Oleh karena itu, semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya ini, sekaligus menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Inilah alasan mengapa pendidikan multikultural menjadi sangat relevan dan mendesak. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran dan penghargaan yang mendalam terhadap budaya lokal di seluruh Indonesia, sementara juga menghadapi arus globalisasi yang terus datang. Pendidikan, yang pada dasarnya merupakan hak dasar setiap individu, memegang peran sentral dalam memastikan kelangsungan budaya lokal. Ini tidak hanya berarti memberikan akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga berarti mengubah individu tersebut menjadi penjaga dan pelindung budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Selain itu, pendidikan juga memiliki dampak yang kuat pada kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berpusat pada multikulturalisme dapat membantu menjaga budaya lokal tetap relevan dalam masyarakat yang semakin modern dan global. Dengan pemahaman budaya yang kuat, generasi muda akan lebih mampu mempertahankan identitas budaya mereka sambil juga bersiap untuk berpartisipasi dalam komunitas global yang lebih luas.

2.3 Kondisi Ekonomi di Kecamatan Bangko Kota Bagansiapiapi

Kabupaten Rokan Hilir

Manajemen pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, telah mengadopsi pendekatan berbasis optimalisasi sumber daya ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan tidak hanya sekadar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus pada dorongan terhadap perubahan yang berarti, di mana program, kegiatan, dan sumber daya manusia menjadi sarana untuk mencapai hasil yang lebih baik, baik dalam hal keluaran, hasil, maupun dampak. Bagansiapiapi, yang dulu dikenal sebagai pusat ekonomi perikanan laut dan perkebunan karet, kini telah bertransformasi menjadi beragam jenis usaha. Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran dalam struktur ekonomi daerah. Usaha seperti produksi Batik Khas Bagansiapiapi, penangkaran walet, oleh-oleh Kacang Pukul, restoran, dan sektor-sektor lain telah mulai mengambil peran signifikan dalam perekonomian lokal.

Meskipun transformasi ekonomi ini terjadi, sebagian penduduk di Bagansiapiapi masih bergantung pada sektor pertanian, termasuk pertanian pangan seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Di samping itu, sektor perkebunan juga tetap relevan, dengan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu yang paling dominan di wilayah ini. Selain itu, masyarakat Bagansiapiapi juga aktif dalam sektor perdagangan, termasuk operasional mini market, toko-toko, warung, pedagang kaki lima, butik, dan berbagai jenis usaha lainnya. Semua ini mencerminkan keragaman mata pencaharian masyarakat setempat. Lebih khusus,

di desa Besito, mata pencaharian masyarakat juga beragam, termasuk dalam berbagai sektor. Ini mencerminkan keragaman ekonomi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya manajemen pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan efisien dan efektif menjadi penting dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah ini. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Besito, sebagai berikut:

**Tabel 2. 3 Data Pekerjaan Kecamatan Bangko Bagansiapiapi
Kabupaten Rokan Hilir**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1.	Pegawai Negeri Sipil	86
2.	TNI/Polri	9
3.	Swasta	1.605
4.	Wiraswasta/Pedagang	645
5.	Petani	34
6.	Tukang	245
7.	Buruh Tani	31
8.	Pensiunan	56
9.	Nelayan	7
10.	Peternak	8
11.	Jasa	82
12.	Pengrajin	1
13.	Pekerja Seni	1
14.	Lainnya	2
15.	Buruh Harian Lepas	1.966

Sumber : Arsip Kabupaten Rokan Hilir, 2023

Data yang disediakan memberikan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi sosial ekonomi mencerminkan posisi individu dalam struktur sosial masyarakat, yang didasarkan

pada aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Posisi sosial ekonomi ini tidak hanya menentukan peran seseorang dalam masyarakat, tetapi juga membawa kewajiban dan hak tertentu yang perlu diakui dan dijalani oleh individu tersebut. Pendekatan pembangunan yang digunakan di Kecamatan Bangko Pusako adalah berbasis optimalisasi sumber daya ekonomi. Ini berarti bahwa fokus pembangunan tidak sekadar melibatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Transformasi ekonomi telah mengubah lanskap di Bagansiapiapi, dengan perekonomian perikanan laut dan perkebunan karet yang sebelumnya dominan digantikan oleh berbagai jenis usaha, termasuk produksi Batik Khas Bagansiapiapi, penangkaran walet, oleh-oleh Kacang Pukul, restoran, dan banyak lainnya.

Meskipun terjadi transformasi ekonomi, beberapa penduduk di Bagansiapiapi masih bergantung pada sektor pertanian, termasuk pertanian pangan seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sektor perkebunan juga tetap relevan, dengan perkebunan kelapa sawit yang mendominasi pemandangan di wilayah ini. Di samping itu, masyarakat Bagansiapiapi juga aktif dalam sektor perdagangan, dengan berbagai jenis usaha termasuk mini market, toko-toko, warung, pedagang kaki lima, butik, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Semua ini mencerminkan keragaman ekonomi dan keseluruhan kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Bangko Pusako. Penting untuk memahami keragaman ini dalam rangka mengembangkan strategi pembangunan yang efektif dan inklusif, yang akan mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan memaksimalkan sumber daya ekonomi yang ada, pembangunan dapat menjadi lebih berkelanjutan

dan relevan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di daerah ini.

2.4 Kondisi Politik di Kecamatan Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

Tantangan utama yang akan dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sambil membangun sistem politik yang demokratis. Tantangan ini akan menjadi dasar bagi arah pembangunan politik di masa depan, dengan dua dimensi utama: penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan sistem politik yang demokratis. Penguatan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi prioritas karena ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan nasional seiring dengan perkembangan sistem politik pasca-reformasi. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul ketegangan dan kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan, terutama dalam konteks perbedaan budaya politik yang belum sepenuhnya memahami arti pentingnya wawasan kebangsaan.

Di samping itu, demokrasi politik menunjukkan adanya partisipasi individu atau kelompok etnis, seperti etnis Tionghoa, yang bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah atau elit politik demi kepentingan etnis sendiri. Hal ini mencerminkan peran identitas dalam politik, di mana kelompok etnik, agama, bahasa, dan lainnya memainkan peran penting dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak dalam demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika politik etnis telah menjadi semakin signifikan sejak masa reformasi di Indonesia. Ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi politik yang diadopsi oleh pemerintah. Era reformasi telah membuka pintu bagi keterbukaan,

demokratisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi, yang pada gilirannya memunculkan kembali kesadaran etnis. Gerakan politik etnis semakin tampak dan bahkan banyak aktor politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, secara sadar menggunakan isu-isu etnis ini dalam praktek politik.

Praktik politik etnisitas mengungkapkan sejauh mana isu-isu etnis dapat menjadi alat yang kuat bagi para aktor politik. Ini telah menarik perhatian akademisi, terutama dalam konteks pemilihan umum (pemilu) dan perilaku pemilih yang mungkin terpolarisasi secara etnis. Terdapat kekhawatiran bahwa pemilu di mana pemilih memilih berdasarkan etnis dapat menghasilkan pemilu yang mungkin berpotensi merusak demokrasi. Dalam hal ini, pemilu semacam itu cenderung menciptakan kelompok-kelompok yang sangat terbagi secara etnis dan kurang mampu mencapai kesepakatan antar-etnis. Walaupun terdapat pemahaman umum bahwa etnisitas memainkan peran penting di berbagai negara, masih ada perdebatan mengenai alasan mengapa pemilih memilih berdasarkan etnis. Beberapa berpendapat bahwa pemilih memilih berdasarkan etnis karena percaya bahwa calon yang berasal dari etnis akan lebih baik dalam melindungi kepentingan.

Masyarakat atau kelompok selalu berinteraksi dengan individu lainnya, dan seringkali individu menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi ketika mencoba memahami budaya orang lain dengan sudut pandang budaya mereka sendiri. Ini dikenal sebagai etnosentrisme, yaitu ketidakmampuan memahami budaya luar dengan cara yang menghargai dan memahami budaya mereka sendiri. Etnosentrisme adalah fenomena yang sering terjadi dalam komunikasi antarbudaya, terutama dalam masyarakat multirasial.

Dalam masyarakat majemuk seperti yang kita lihat dalam era globalisasi, para ahli komunikasi dan antropologi merasa bahwa pentingnya untuk memahami dan menghargai budaya orang lain selain budaya kita sendiri. Etnosentrisme terhadap kelompok etnis tertentu, seperti orang Tionghoa, sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap budaya yang dimiliki oleh kelompok etnis tersebut dan kelompok etnis pribumi. Salah satu faktor yang berkontribusi pada etnosentrisme adalah kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, seperti perbedaan dalam ide, pandangan, karya, dan jerih payah orang lain. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya empati terhadap individu yang lebih lemah, kurangnya rasa solidaritas sosial, sikap egois, dan kurangnya perasaan atau sensitivitas sosial.

Masalah ini sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap keragaman budaya atau multikulturalisme yang ada di masyarakat, seperti yang terjadi di Bagan Siapi-api. Hal ini diperparah oleh fluktuasi dan eskalasi meningkatnya situasi nasional dan kebijakan yang dapat berdampak luas, seperti ancaman terorisme. Selain itu, dalam konteks politik, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya optimal karena ada berbagai masalah internal dan eksternal yang dihadapi oleh partai politik. Masyarakat masih merasa kecewa terhadap partai politik, dan mekanisme kaderisasi dalam partai politik juga masih kurang efektif. Ini sangat penting karena partai politik memiliki peran sentral dalam pengembangan demokrasi dalam sistem politik yang sedang berkembang.

Dalam kerangka pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik

dalam era saat ini, pemerintah menjadi fasilitator dan penggerak utama dalam mencapai tujuan tersebut. Pemerintah memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami dan menghargai budaya lain serta menciptakan kondisi yang mendukung kerjasama antarbudaya. Dalam situasi globalisasi yang semakin kompleks, peran pemerintah sangat penting dalam mempromosikan dialog, toleransi, dan pemahaman antarbudaya.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, tindakan ini diambil dalam rangka menjalankan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Selain itu, ini juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam kerangka ini, kami memandang ke arah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 sebagai landasan utama untuk pengelolaan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penyusunan rencana ini, kami merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Semua langkah ini juga didasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kondisi Lingkungan Strategis Daerah.

Karakteristik Kabupaten Rokan Hilir, dengan pertumbuhan penduduk yang

cukup tinggi dan komposisi yang sangat beragam, menimbulkan potensi konflik sosial yang bersifat horizontal. Selain itu, penurunan etika dan moral masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya perjudian, prostitusi, penyalahgunaan alkohol, dan narkoba, telah mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum, yang pada gilirannya menghambat upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Semua ini merupakan ancaman terhadap integritas bangsa. Di sisi lain, isu politisasi nilai-nilai agama menjadi ancaman serius bagi masalah nasional, dengan kelompok primordial yang menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan politik dan kekuasaan dengan dalih agama.

Dalam konteks ini, keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kecamatan Bangko Pusako Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas partai politik, memberikan dukungan keuangan kepada partai politik, memajukan dan mengatur lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik serta agenda-agenda politik nasional lainnya. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses demokratisasi. Selain itu, kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada daerah dalam hal pengelolaan politik dan pemerintahan telah menciptakan kesempatan bagi upaya menciptakan stabilitas politik, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta menjaga ketertiban umum di daerah ini.

Menyimak amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, Kecamatan Bangko Pusako Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai bagian integral dari Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa bertekad untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga kerukunan nasional, tanpa mengurangi ruang bagi demokrasi sesuai dengan perkembangan dinamika politik saat ini. Era reformasi telah membawa perubahan dalam tatanan politik nasional, yang juga ikut mempengaruhi perilaku masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Peningkatan kesadaran akan hak-hak politik adalah sebuah hal positif dalam perkembangan demokrasi; akan tetapi, kita harus berhati-hati menghadapi dampak negatif, seperti tindakan kekerasan dan aksi anarkis, yang terkadang muncul sebagai ekspresi ketidakmatangan dalam berpolitik. Kabupaten Rokan Hilir, yang memiliki komposisi penduduk yang sangat beragam, juga dihadapkan pada perbedaan latar belakang budaya yang signifikan. Oleh karena itu, budaya Melayu yang merupakan budaya lokal diharapkan dapat berperan sebagai alat penyatuan bagi berbagai budaya yang ada di daerah ini.

Tidak bijaksana dalam mengelola perbedaan ini berpotensi menciptakan kerawanan yang dapat memicu konflik sosial dengan berbagai dimensi, baik horisontal maupun vertikal. Ini menjadi ancaman serius terhadap integritas dan stabilitas sosial, yang berpotensi mempengaruhi tingkat lokal, regional, dan nasional. Di samping itu, pengaruh globalisasi yang terutama tercermin dalam arus informasi yang pesat telah membawa masyarakat menuju tingkat keterbukaan yang tinggi. Meskipun ini memiliki dampak positif pada perkembangan bangsa, kita juga harus mewaspadaai dampak negatifnya terhadap ketahanan nasional dan stabilitas.

Kesimpulanya, Kecamatan Bangko Pusako Bagansiapiapi Kabupaten

Rokan Hilir memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas partai politik, memberikan dukungan keuangan kepada partai politik, memajukan dan mengatur lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik serta agenda-agenda politik nasional lainnya. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses demokratisasi.